

**PENELITIAN**

**LAPORAN PENELITIAN**



**ANALISIS SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA INSTANSI PEMERINTAH  
DAERAH**

**Oleh:**

**Abdullah Taman, M. Si., Ak., CA.**

**NIP. 196306241990011001**

**Arief Zuliyanto Susilo, M.Sc.**

**NIP. 198207062015041001**

**Adeng Pustikaningsih, M. Si**

**NIP. 197508252009122001**

**Ahmad Samlawi, M. Si**

**NIP.11410630322528**

**Ghina Wintang A**

**NIM. 17812144014**

**Wulan Ramadhani**

**NIM. 17812144017**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2018**

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Organisasi sektor publik sering dianggap tidak dapat memenuhi ekspektasi masyarakat dalam banyak hal. Organisasi sektor publik dalam banyak hal sering mengambil keputusan yang kurang tepat bahkan menyisakan pertanyaan bagi masyarakat mengenai penggunaan dana masyarakat. Untuk bisa memberikan informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kepada masyarakat, maka reformasi perlu dilakukan.

Reformasi yang diperlukan salah satunya adalah reformasi dibidang akuntansi dan keuangan terutama terkait masalah transparansi dan akuntabilitas. Pemerintahan dalam era reformasi telah melakukan koreksi secara menyeluruh atas sistem keuangan negara yang dipergunakan pada masa pemerintahan orde baru untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Koreksi pertama yang dilakukan adalah mengintegrasikan anggaran negara dengan meniadakan perbedaan antara anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Kontrol atas APBN kini sepenuhnya berada ditangan Menteri Keuangan. Peran ananggaran non bujeter semakin dikurangi. Adminisrasi dan pertanggungjawaban dirubah secara mendasar. Jenis dan format laporan keuangan Negara diubah. Koreksi kedua dengan memperkenalkan Standar Akuntansi Pemerintahan pada tanggal 13Juni2005. Koreksi ini untuk memulihkan kebebasan dan kemandirian BPK dan memperluas obyek pemeriksaannya

Beberapa koreksi di atas dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang diawali dengan Undang-Undang No. 22 tahun1999 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang ini mengatur berbagai bentuk otonomi daerah. Otonomi di bidang keuangan memberikan kewenangan kepada daerah untuk memperoleh sumber pendapatan selain dari APBN, diantaranya adalah dari Pendapatan Asli Daerah, dan melakukan pinjaman dari dalam negeri dan luar negeri. Pemerintah Daerah berhak menetapkan APBD melalui peraturan daerah. Selanjutnya ada beberapa Undang-Undang yang diterbitkan diantaranya Undang-Undang Nomor17Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Berbagai Undang-Undang lain muncul seperti UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab.

Pengelolaan pendapatan dan pembelanjaan menjadi sesuatu yang sangat penting untuk memastikan layanan dapat berjalan lancar dan mengurangi atau bahkan menghilangkan komponen pendanaan melalui utang. Pendanaan dengan utang memang menggiurkan karena tidak perlu memikirkan sumber pendanaan lainnya, namun harus menerima *cost of debt* yang dalam jangka panjang mungkin akan sangat membebani.

## **B. Tujuan**

Pengeluaran untuk belanja biasanya memiliki komposisi item yang konsisiten meskipun mungkin tidak perlu dilakukan lagi pada periode selanjutnya. Pendapatan daerah yang meningkat, mungkin justru akan meningkatkan pengeluaran yang mungkin tidak terlalu penting di tahun berjalan. Untuk mengamati fenomena tersebut, maka penelitian ini dilakukan

## **C. Manfaat**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi instansi publik dalam menyusun skema pendapatan dan pengeluaran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep *New Public Management*(NPM)**

Penerapan NPM di sejumlah Negara OECD dimulai tahun 1980-an. NPM merupakan teori manajemen publik yang beranggapan bahwa praktik manajemen sektor swasta adalah lebih baik dari praktik manajemen sektor publik, maka dari itu untuk meningkatkan kinerja sektor publik perlu mengadaptasi pengelolaan yang dilakukan oleh instansi swasta, misalnya terkait dengan mekanisme pasar, kompetisi tender (*Compulsory Competitive Tendering*) dan privatisasi perusahaan-perusahaan publik (Hughes, 1998 dalam Mahmudi, 2003).

Filosofi dan konsep NPM diturunkan dari dua sumber yang berbeda. Sumber pertama dari praktik manajemen sektor swasta yang dikenal dengan "managerialism" yang kedua dari bidang ekonomi seperti teori pilihan publik, teori keagenan dan teori biaya transaksi. Esensi managerialisme adalah bahwa manajemen adalah generik, aktivitas instrumental yang murni dan mempunyai seperangkat prinsip yang dapat diaplikasikan baik ke dalam bisnis publik maupun swasta. Pandangan rasional dari ahli ekonomi adalah bahwa semua perilaku manusia didominasi oleh kepentingan diri sendiri dan akan cenderung memaksimalkan kekayaan. Oleh karena itu individu lebih memilih untuk kepuasan individual dan alasan efisiensi. Ini merupakan logika teori pilihan publik. Teori keagenan meletakkan argument bahwa principal seharusnya berbeda dari agensi sehingga prinsipal dapat mengontrol dan membuat agen akuntabel atas apa yang dihasilkan. Teori ekonomi institusional yang disebut juga teori biaya

#### **B. Analisis Laporan Keuangan**

Analisis laporan keuangan dapat dijelaskan sebagai menguraikan isi laporan keuangan menjadi bagian-bagian tertentu yang lebih kecil untuk kemudian dilihat keterkaitannya dengan elemen lain dengan tujuan mengetahui kondisi keuangan yang lebih mendalam untuk pengambilan keputusan (Harahap, 2001). Laporan keuangan dibutuhkan oleh berbagai pihak untuk mengambil keputusan dan atau hanya sekedar ingin tahu mengenai kondisi perusahaan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap posisi keuangan maupun perkembangan perusahaan antara lain :

- a. Pemilik perusahaan atau koperasi, sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan terutama untuk perusahaan-perusahaan yang kepemimpinannya diserahkan kepada orang lain seperti perseroan. Karena dengan laporan tersebut perusahaan akan dapat menilai sukses tidaknya manager dalam memimpin perusahaannya. Karena hasil-hasil stabilitas serta kontinuitas atau kelangsungan perusahaan tergantung dari cara kerja atau efisiensi manajemennya tidak memuaskan maka para pemiliknya akan mengganti manajemennya.
- b. Manager atau pimpinan perusahaan, dengan mengetahui posisi keuangan perusahaan periode yang lalu akan dapat menyusun rencana yang lebih baik, memperbaiki sistem pengawasannya dan menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaannya yang lebih tepat. Bagi manajemen yang penting adalah bahwa laba yang dicapai cukup tinggi, cara kerja yang efisien, aktiva aman dan terjaga baik, struktur permodalan sehat, serta perusahaan mempunyai perencanaan yang baik mengenai masa depan baik dibidang keuangan maupun dibidang operasi.

Laporan keuangan akan dapat digunakan oleh manajemen untuk :

- a. Mengukur tingkat biaya dari berbagai kegiatan perusahaan.
- b. Untuk menentukan/mengukur efisiensi tiap-tiap bagian, proses atau produksi serta untuk menentukan derajat keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan.
- c. Untuk menilai dan mengukur hasil kerja tiap-tiap individu yang telah diberi wewenang dan tanggung jawab.
- d. Untuk menentukan perlu tidaknya digunakan kebijaksanaan atau prosedur yang baru untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Para Investor, banker, maupun para kreditur lainnya sangat berkepentingan atau memerlukan laporan keuangan perusahaan dimana mereka ini menanamkan modalnya. Mereka ini berkepentingan terhadap prospek keuntungan dimasa yang akan datang dan perkembangan perusahaan selanjutnya, untuk mengetahui jaminan investasinya dan untuk mengetahui kondisi kerja atau kondisi keuangan jangka pendek perusahaan tersebut.

Dari hasil analisa laporan keuangan tersebut para investor, banker dan para kreditur akan dapat menentukan langkah-langkah yang harus ditempuh. Pemerintah dalam rangka memenuhi penerimaan negara, dimana perusahaan tersebut berdomisili sangat berkepentingan dengan laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan, disamping untuk menentukan besarnya pajak

yang harus ditanggung oleh perusahaan juga sangat diperlukan oleh biro statistik, dinas perindustrian,

Tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan adalah:

- a. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu
- b. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan perusahaan
- c. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki
- d. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan untuk penilaian kinerja manajemen.

Langkah yang dilakukan dalam analisis keuangan adalah:

- a. Mengumpulkan laporan keuangan dan data yang diperlukan selengkap mungkin
- b. Melakukan pengukuran-pengukuran atau perhitungan-perhitungan dengan rumus-rumus tertentu. Melakukan interpretasi terhadap hasil perhitungan dan pengukuran.
- c. Membuat laporan tentang posisi keuangan perusahaan
- d. Memberikan rekomendasi yang dibutuhkan sehubungan dengan hasil analisis tersebut

Untuk mencapai beberapa tujuan tersebut, ada banyak cara dan hal yang dikaji dalam analisis laporan keuangan. Kenyataannya tidak semua bisnis membuat laporan keuangan yang lengkap dan memberikan informasi yang akurat, seperti pedagang kaki lima yang digunakan dalam penelitian ini. Penyusunan laporan keuangan yang mudah dibaca dan diinterpretasi tidaklah murah, ada biaya untuk mempersiapkannya yang mungkin tidak dapat dibayar oleh para pedagang kaki lima. Laporan keuangan yang tidak tersedia, bukan berarti tidak ada yang bisa dianalisis dari kegiatan operasional mereka.

Untuk mengatasi keterbatasan informasi yang mungkin bermanfaat dalam melakukan analisis, maka penulis melakukan penelitian atas sumber pendanaan yang mereka peroleh dan bagaimana mereka memanfaatkannya. Informasi berupa laporan keuangan yang tidak tersedia, maka informasi ini akan diperoleh dengan cara melakukan interview dan atau diskusi dengan mereka secara langsung.

### **C. Sumber Dana dan Penggunaan Modal Kerja**

Dalam praktiknya dana yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari pinjaman maupun modal sendiri, dapat digunakan untuk dua hal. *Pertama* digunakan untuk keperluan investasi, artinya dana ini digunakan secara berulang-ulang, seperti pembelian tanah, bangunan, mesin, kendaraan,

dan aktiva lainnya. *Kedua*, dana digunakan untuk pembiayaan jangka pendek, seperti pembelian bahan baku, membayar gaji dan upah, dan biaya-biaya operasional lainnya. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja merupakan analisis yang berhubungan dengan sumber-sumber dana dan penggunaan dana yang berkaitan dengan modal kerja perusahaan.(Kasmir,2008)

Dalam praktiknya pengertian dana atau fund dibagi ke dalam beberapa pengertian berikut ini.

1. Dana dianggap sebagai kas(uang tunai)
2. Dana dianggap sebagai uang yang disimpan di bank dalam bentuk giro atau tabungan
3. Dana dianggap sebagai modal kerja
4. Dana dianggap sebagai seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan
5. Dana dianggap sebagai aktiva yang memiliki sifat sama dengan kas

Modal kerja dapat diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek, seperti kas, bank,surat-surat berharga,piutang,sediaan, dan aktiva lancar.

### **BAB III**

#### **SAMPLE DAN METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan dasar analisis sumber dan penggunaan dana. Penelitian ini memanfaatkan laporan informasi keuangan yang disediakan untuk publik oleh instansi sektor publik. Informasi laporan keuangan diperoleh dari data yang disediakan oleh BPS yang di dalamnya terdapat pula laporan-laporan keuangan daerah lain. Dengan menggunakan data ini, data keuangan Propinsi DIY dapat dibandingkan dengan nasional secara keseluruhan. Penelitian mengkaji perbandingan antara sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran serta fluktuasinya selama periode pengamatan baik antar tahun maupun antar tahun dan dengan tingkat nasional berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Biro Pusat Statistik. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan mengamati pertumbuhan dan atau perubahan pada sisi pendapatan dan belanja sektor publik.

## **BAB 4**

### **HASIL dan PEMBAHASAN**

#### **A. PENERIMAAN**

##### **A.1 Persentase Perubahan Penerimaan dari Tahun ke Tahun**

Pada periode 2014 - 2015, penerimaan DIY mengalami kenaikan terbesar pada Lain-lain PAD yang Sah sebesar 21,13%. Sedangkan penurunan terbesar terdapat pada Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar 65,16%. Pada tahun 2015 - 2016, penerimaan DIY mengalami kenaikan terbesar pada pos Dana Alokasi Khusus sebesar 1545,70%. Sedangkan penurunan terbesar terdapat pada Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar 98,18%. Pada tahun 2016-2017, penerimaan DIY mengalami kenaikan terbesar pada Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar 64,57%. Sedangkan penurunan terbesar terdapat pada Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar 84,05%. Untuk lebih jelas, perubahan tersebut digambarkan pada gambar 4.1

##### **A.2 Persentase Kontribusi Penerimaan DIY terhadap Total Penerimaan DIY**

Pada tahun 2014 persentase kontribusi penerimaan DIY terhadap total penerimaan DIY terbesar terdapat pada Pendapatan Asli Daerah sebesar 41,50%. Sedangkan kontribusi penerimaan terendahnya terdapat pada Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar 0,18%. Pada tahun 2015 persentase kontribusi penerimaan DIY terhadap total penerimaan DIY terbesar terdapat pada Pendapatan Asli Daerah sebesar 40,73%. Sedangkan kontribusi penerimaan terendahnya terdapat pada Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar 0,06%. Pada tahun 2016 persentase kontribusi penerimaan DIY terhadap total penerimaan DIY terbesar terdapat pada Dana Perimbangan sebesar 39,74%. Sedangkan kontribusi penerimaan terendahnya terdapat pada Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar 0,001%. Pada tahun 2017 persentase kontribusi penerimaan DIY terhadap total penerimaan DIY terbesar terdapat pada Dana Perimbangan sebesar 47,30%. Sedangkan kontribusi penerimaan terendahnya terdapat pada Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam sebesar 0,0001%

##### **A.3. Persentase Kontribusi Penerimaan DIY terhadap Penerimaan Indonesia**

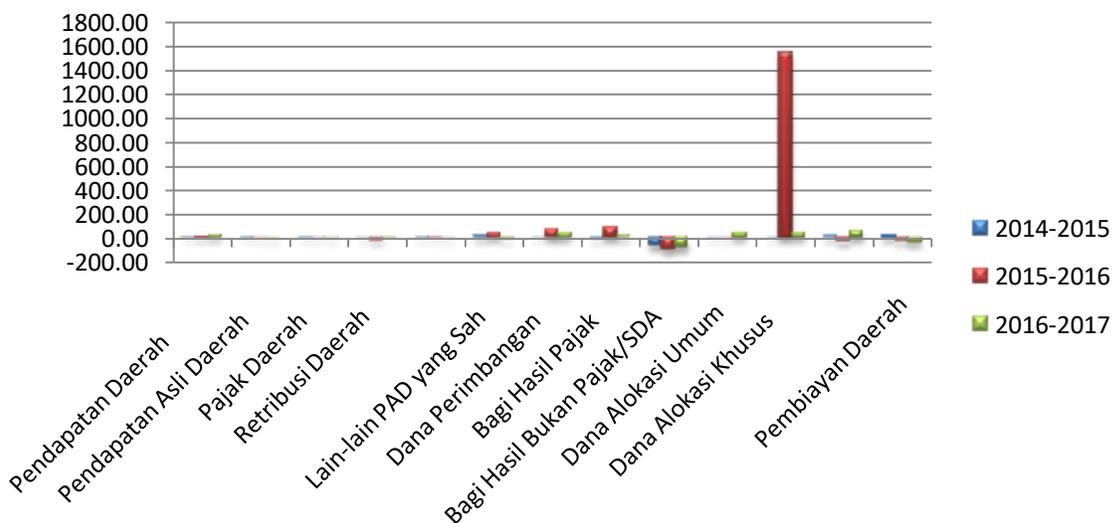
Pada tahun 2014, persentase penerimaan DIY terhadap penerimaan Indonesia terbesar terdapat pada Dana Alokasi Umum sebesar 48,04%. Sedangkan persentase terendahnya terdapat pada Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar 0,02%. Pada tahun 2015, persentase

penerimaan DIY terhadap penerimaan Indonesia terbesar terdapat pada Dana Alokasi Umum sebesar 25,50%. Sedangkan persentase terendahnya terdapat pada Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar 0,01%. Pada tahun 2016, persentase penerimaan DIY terhadap penerimaan Indonesia terbesar terdapat pada Dana Perimbangan sebesar 7,65%. Sedangkan persentase terendahnya terdapat pada Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar 0,0001%. Pada tahun 2017, persentase penerimaan DIY terhadap penerimaan Indonesia terbesar terdapat pada Dana Perimbangan sebesar 9,21%. Sedangkan persentase terendahnya terdapat pada Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar 0,00001%.

#### A.4 Sumber Dan Penggunaan Yang Naik Dan Turun

Persentase kontribusi penerimaan terhadap total pendapatan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 mengalami penurunan yakni pada Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam. Hal ini sama halnya dengan persentase kontribusi pengeluaran terhadap total pengeluaran yang mengalami penurunan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 yaitu pada pengeluaran yang berasal dari Belanja Bantuan Sosial Selain itu, meningkatnya total pendapatan di DIY dari tahun 2014-2017 dialokasikan pada pengeluaran berupa Belanja Modal yang selalu meningkat dari tahun 2014-2017 yaitu tahun 2014 sebesar 12,54%, tahun 2015 sebesar 16,05%, tahun 2016 sebesar 19,60%, dan tahun 2017 sebesar 19,99%

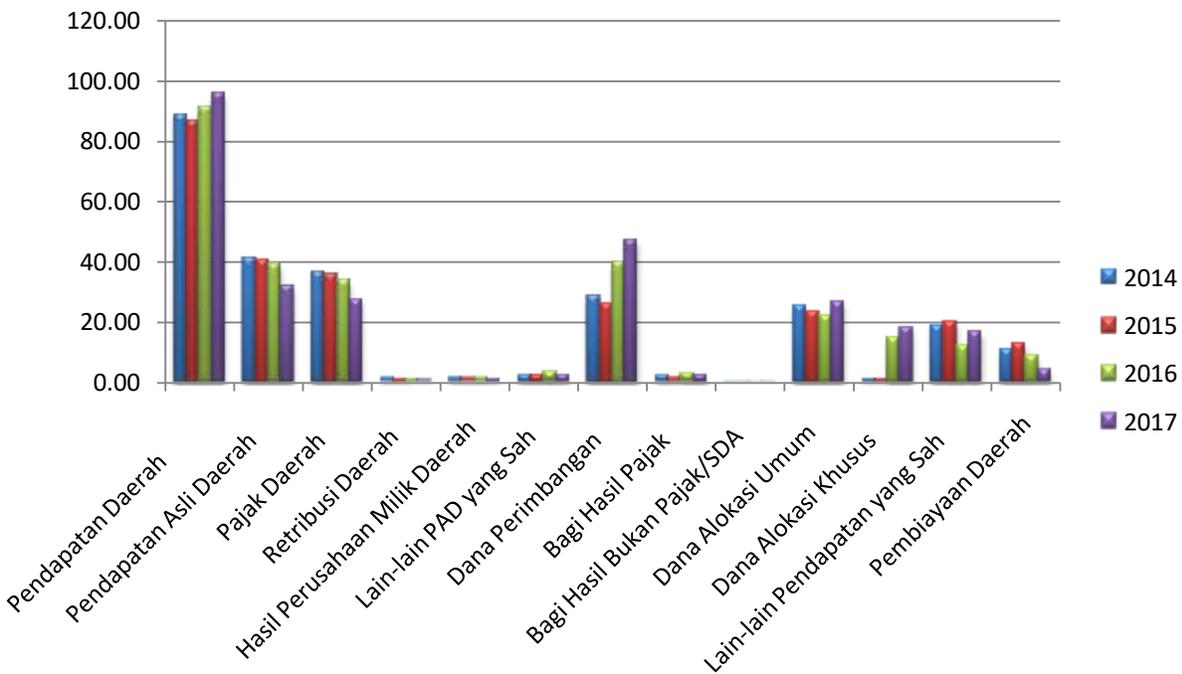
**Gambar 4.1**  
**Persentase Perubahan Penerimaan dari Tahun ke Tahun**



### A.5 Persentase Perubahan Penerimaan dari Tahun ke Tahun

Berdasarkan gambar 4.1 terlihat bahwa pada tahun 2014 - 2015, penerimaan DIY mengalami kenaikan terbesar pada Lain-lain PAD yang Sah sebesar 21,13%, kemudian pada tahun 2015-2016 penerimaan terbesar terdapat pada Dana Alokasi Khusus 1545,70%, dan pada tahun 2016-2017 kenaikan penerimaan terbesar terdapat pada Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar 64,57%. Sedangkan penurunan penerimaan terbesar dari tahun ke tahun terdapat pada Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam berturut-turut 65,16%, 98,18%, dan 84,05%

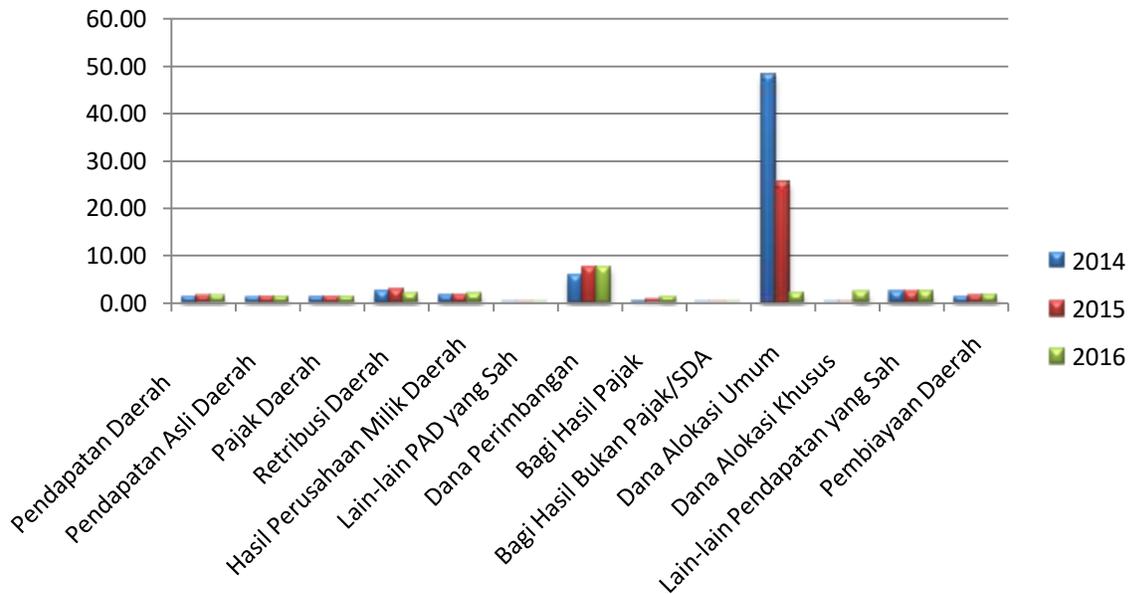
**Gambar 4.2**  
**Persentase Kontribusi Pos-Pos Penerimaan DIY terhadap Total Penerimaan DIY**



### A.6 Persentase Kontribusi Pos-Pos Penerimaan DIY terhadap Total Penerimaan DIY

Berdasarkan gambar 4.2, persentase kontribusi penerimaan DIY terhadap total penerimaan DIY terbesar pada tahun 2014 dan 2015 berasal dari Pendapatan Asli Daerah masing-masing 41,50% dan 40,73%. Kemudian untuk tahun 2016 dan 2017, persentase terbesar berasal dari Dana Perimbangan masing-masing 39,74% dan 47,30%. Sedangkan penurunan terbesar dari tahun 2014 sampai dengan 2017 berasal dari Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam masing-masing sebesar 0,18%, 0,06%, 0,001%, dan 0,0001%.

**Gambar 4.3**  
**Persentase Kontribusi Pos-Pos Penerimaan DIY terhadap**  
**Penerimaan INA**



### **A.7 Persentase Kontribusi Penerimaan DIY terhadap Penerimaan INA**

Berdasarkan gambar 4.3, dapat dilihat bahwa persentase kontribusi penerimaan DIY terhadap penerimaan Indonesia terbesar pada tahun 2014 dan 2015 berasal dari Dana Alokasi Umum yang masing-masing sebesar 48,04% dan 25,50%. Kemudian persentase penerimaan DIY terhadap penerimaan Indonesia terbesar pada tahun 2016 dan 2017 berasal dari Dana Perimbangan yakni sebesar 7,65% dan 9,21%. Sedangkan persentase penurunan dari tahun 2014 sampai dengan 2017 berasal dari Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam yang berturut-turut sebesar 0,02%, 0,01%, 0,0001%, dan 0,000001%.

## **B. PENGELUARAN**

### **B.1 Presentase dari tahun ke tahun**

Pada tahun 2014-2015 pengeluaran terbesar berada pada belanja modal yaitu sekitar 41,84816%. Sedangkan untuk pengeluaran terendahnya berada pada pengeluaran tidak terduga yaitu sekitar - 100%. Pada tahun 2015-2016 pengeluaran terbesar berada pada belanja modal yaitu sekitar 33,34461%. Sedangkan untuk yang terendah berada pada belanja bantuan sosial yaitu sekitar - 72,87%. Pada tahun 2016-2017 pengeluaran terbesar berada pada pengeluaran tidak terduga

yaitu sekitar 40.739,96%. Sedangkan untuk yang terendah berada pada pembiayaan daerah yaitu sekitar -99,05%.

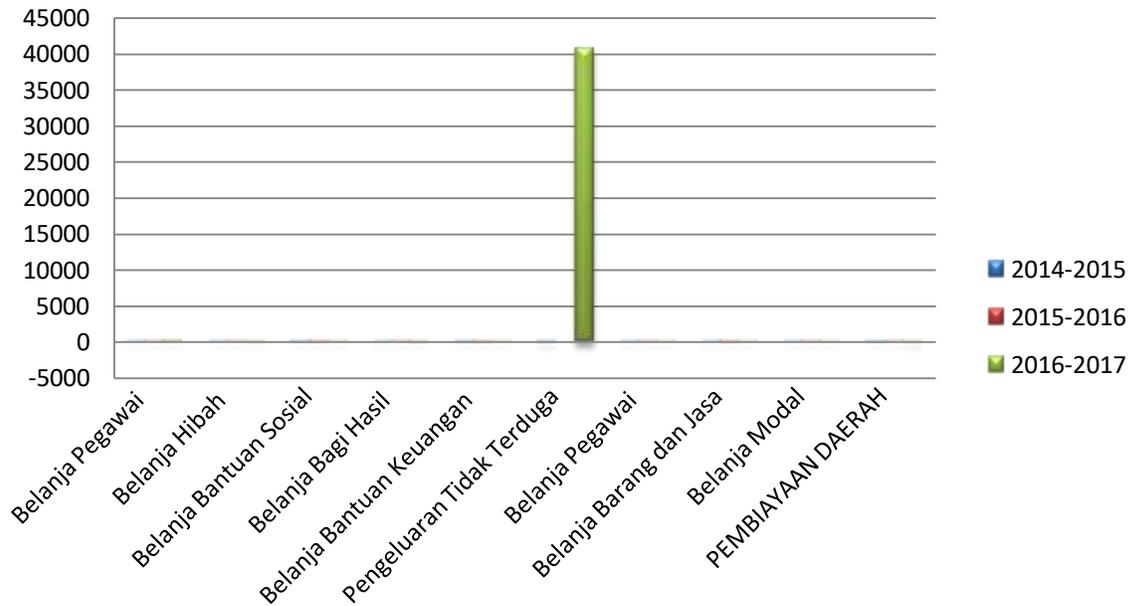
## **B.2 Presentase kontribusi terhadap total pengeluaran**

Pada tahun 2014 pengeluaran terbesar berada pada belanja barang dan jasa yaitu sekitar 24,57%. Sedangkan pengeluaran terendahnya pada pengeluaran tidak terduga yaitu sekitar 0,06%. Pada tahun 2015 pengeluaran terbesar berada pada belanja barang dan jasa yaitu 23,76%. Sedangkan pengeluaran terendah pada belanja bantuan sosial yaitu sekitar 0,18%. Pada tahun 2016 pengeluaran terbesar berada pada belanja barang dan jasa yaitu 20,50%. Sedangkan pengeluaran terendah pada pengeluaran tidak terduga yaitu sekitar 0,001% Pada tahun 2017 pengeluaran terbesar berada pada belanja pegawai yaitu sekitar 25,30%. Sedangkan untuk yang terendah pada belanja bantuan sosial yaitu sekitar 0,04%.

## **B.3 Perbandingan langsung antara pengeluaran DIY terhadap pengeluaran Indonesia**

Pada tahun 2014 perbandingan tertinggi berada pada belanja barang dan jasa yaitu sekitar 1,68%. Sedangkan untuk yang terendah berada pada belanja bantuan keuangan yaitu sekitar 0,47%. Pada tahun 2015 perbandingan tertinggi berada pada belanja pegawai yaitu sekitar 2,00%. Sedangkan untuk yang terendah berada pada belanja bantuan sosial yaitu sekitar 0,23%. Pada tahun 2016 perbandingan tertinggi berada pada belanja modal yaitu sekitar 1,87%. Sedangkan untuk perbandingan terendah berada pada belanja bantuan sosial yaitu sekitar 0,06. Pada tahun 2017 perbandingan tertinggi berada pada pengeluaran tidak terduga yaitu sekitar 2,65%. Sedangkan untuk perbandingan terendah berada pada pembiayaan daerah yaitu sekitar 0,04%.

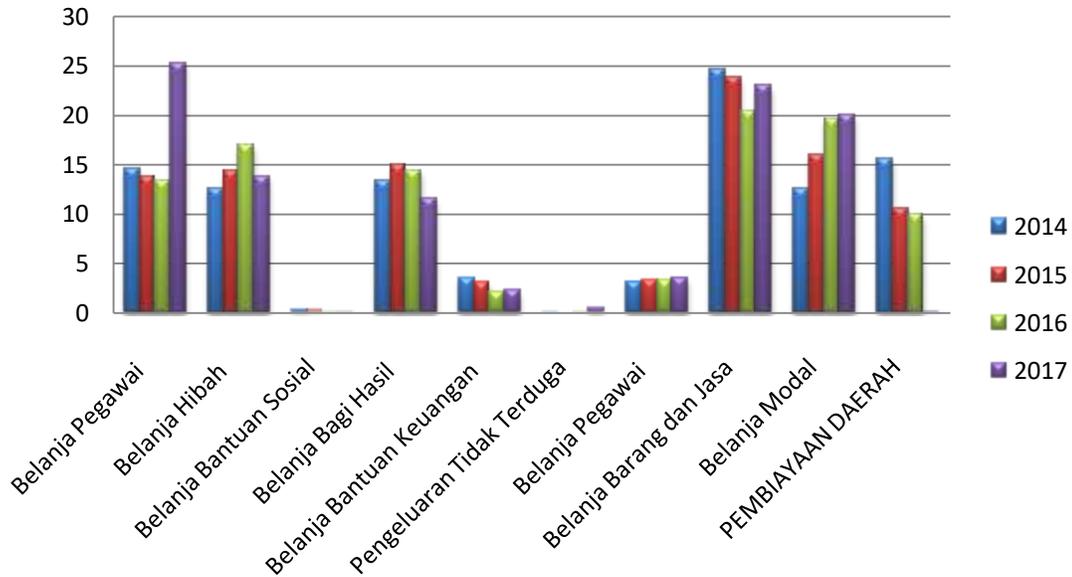
**Gambar 4.4**  
**Perubahan Pengeluaran dari tahun ke tahun**



#### **B.4 Persentase Perubahan Pengeluaran dari Tahun ke Tahun**

Berdasarkan grafik tersebut pada tahun 2014 – 2017 yang selalu mengalami peningkatan yaitu pada Belanja Pegawai dengan persentase berturut-turut 5,53%, 5,57%, 130,59%. Selain itu pada Pengeluaran Tidak Terduga dengan persentase -100% menjadi 40739,96%. Sedangkan yang selalu mengalami penurunan yaitu pada Belanja Bagi Hasil dengan persentase berturut-turut 23,46%, 4,93%, -1,72%. Selain itu pada Belanja Modal dengan persentase berturut-turut 41,85%, 33,34%, 24,34%.

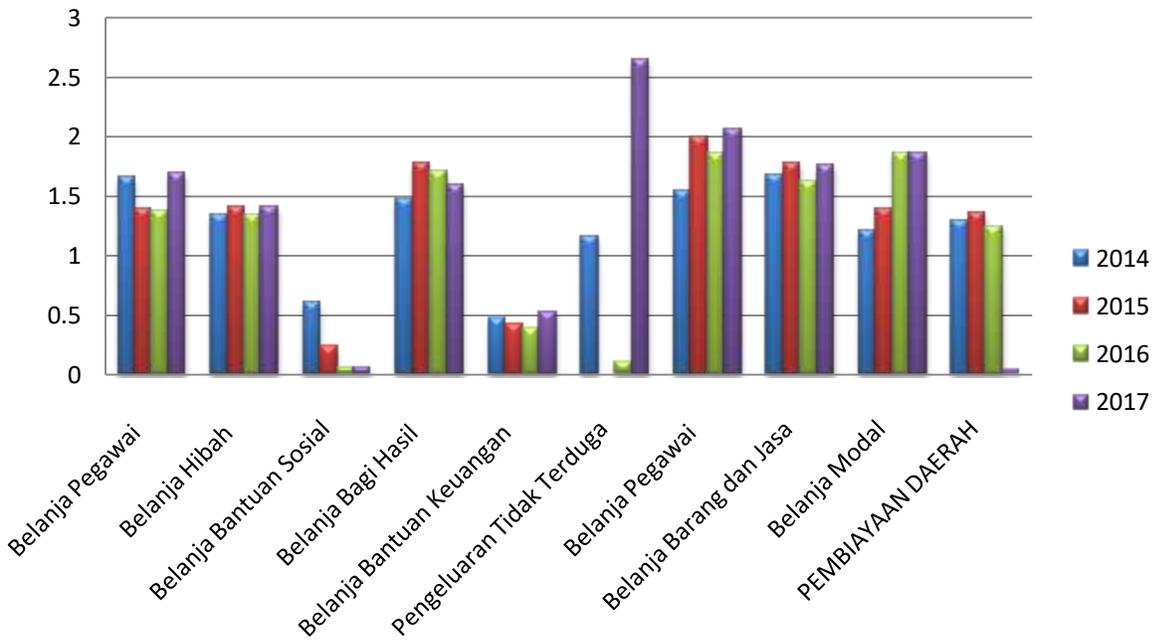
**Gambar 4.5**  
**Persentase Kontribusi Pos Pengeluaran DIY terhadap Total**  
**Pengeluaran DIY**



### **B.5 Persentase Kontribusi Pos-Pos Pengeluaran DIY terhadap Total Pengeluaran DIY**

Berdasarkan diagram batang yang ditunjukkan pada gambar 4.5, persentase kontribusi setiap pos pengeluaran DIY terhadap total pengeluaran DIY pada tahun 2014-2017 yang selalu mengalami peningkatan yaitu pada Belanja Modal dengan persentase berturut-turut 12,54%, 16,05%, 19,60%, 20%. Sedangkan yang mengalami penurunan yaitu pada Belanja Bantuan Sosial dengan persentase 28%, 0,18%, 0,05%, 0,04%, pada periode yang sama.

**Gambar 4.6**  
**Persentase Pos Pengeluaran DIY Terhadap Pos Pengeluaran Indonesia**



### **B.6 Persentase Kontribusi Pos Pengeluaran DIY terhadap Pos Pengeluaran Indonesia**

Berdasarkan gambar 4.6 di atas, dapat dilihat bahwa persentase pengeluaran DIY terhadap pengeluaran Indonesia terbesar pada tahun 2014 yaitu pada Belanja Pegawai dengan persentase 1,66%. Tahun 2015 pada Belanja Bagi Hasil dengan persentase 1,78%. Tahun 2016 pada Belanja Modal dengan persentase 1,87% dan tahun 2017 pada Pengeluaran Tidak Terduga dengan persentase 2,65%. Sedangkan untuk persentase terendah pada tahun 2014 pada Belanja Bantuan Keuangan dengan 0,45%. Tahun 2015 pada Pengeluaran Tidak Terduga. Tahun 2016 pada Belanja Bantuan Sosial dengan 0,06% dan tahun 2017 pada Pembiayaan Daerah dengan 0,04%.

Berdasarkan poin-poin tentang pengeluaran, seperti pada poin-poin pendapatan perubahan cenderung konsisten. Konsistensi fluktuasi pendapatan dan juga pengeluaran mengindikasikan pengelolaan keuangan yang belum optimal karena persentasenya belum berdasarkan kebutuhan. Hal tersebut terbukti dari sedikit sekali perubahan pertumbuhan pada penerimaan dan penggunaan dana

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan perhitungan dan perbandingan antara pos-pos anggaran PEMDA DIY dan juga terhadap Indonesia secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa

1. Perubahan pendapatan daerah yang memiliki perubahan besar terhadap total pendapatan Pemda DIY adalah dana alokasi khusus pada tahun 2015-2016, sedangkan sumber yang lain mengalami perubahan yang tidak berarti
2. Secara nasional, pendapatan daerah Provinsi DIY berkontribusi cukup besar
3. Pengeluaran rutin relatif tetap dengan pos-pos yang sama, namun pada tahun 2016-2017 pengeluaran tidak terduga melonjak tajam yang tidak diberi keterangan peruntukan dan sebabnya.
4. Meskipun pendapatan dan pengeluaran Pemda DIY setiap tahunnya tidak sama, namun kontribusi terhadap total penerimaan dan belanja secara nasional tidak terlalu banyak berubah.
5. Sumber dan penggunaan dana seperti yang kurang direncanakan bergantung pada kebutuhan namun pada tren dan bendingannya dengan daerah lain.

#### **B. Saran**

Informasi dari BPS dapat dijadikan rujukan untuk memperoleh data laporan keuangan PEMDA secara cepat namun, tidak ada keterangan tentang hal-hal yang perlu menjadi perhatian khusus. Untuk mengetahui lebih detail mengenai dasar peruntukan pengeluaran harus mengkaji setiap laporan keuangan PEMDA masing-masing secara langsung. Pemerintah daerah perlu lebih berhati-hati dalam mengatur pengelolaan dana tergantung pada kebutuhan sesungguhnya.

## Daftar Pustaka

- M. Tohar, 2001, *Membuka Usaha Kecil*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Gusmulyadi, 1994, *Penataan Ruang Pedagang Kaki Lima Kawasan Pusat Kota Yogyakarta*, UNISBA
- Gibson, W. and Brown, A. (2009). *Working With Qualitative Data*. London: Sage.
- Hood, Christopher, 1991, *A Public Management For All Seasons*, Public Administration Vol. 69 Spring(3-19)
- Kasmir. 2010. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Mahmudi, 2003, *New Public Management (NPM): Pendekatan Baru Manajemen Sektor Publik*, *Sinergi*, Vol 6 No. 1, hal 69-76.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

## PERSONALIA PENELITIAN

<b>KETUA</b>	
Nama	Abdullah Taman, S.E.,M.Si.,Ak
NIP	196306241990011001
Pangkat/Jab/Gol	Asisten Ahli / IIIc
Prodi/Jur/Fakultas	Akuntansi / P. Akuntansi / FE
Telepon	0811250575
Email	abtaman@uny.ac.id
<b>ANGGOTA 1</b>	
Nama	Arief Zuliyanto Susilo, M.Sc.
NIP	198207062015041001
Pangkat/Jab/Gol	Penata Muda Tk I/ Tenaga Pengajar / IIIb
Prodi/Jur/Fakultas	Akuntansi / P. Akuntansi / FE
Telepon	081329424141
Email	azuliyanto@gmail.com
<b>ANGGOTA 2</b>	
Nama	Adeng Putikaningrum, M. Si
NIP	19870204 201404 1 002
Pangkat/Jab/Gol	Penata Muda Tk I/ Tenaga Pengajar / IIIb
Prodi/Jur/Fakultas	Akuntansi / P. Akuntansi / FE
Telepon	082221801695
Email	adengpustikaningsih@uny.ac.id
<b>ANGGOTA 3</b>	
Nama	Ahmad Samlawi, S.E.,M.Si
NIP	11410630322528
Pangkat/Jab/Gol	Tenaga Pengajar
Prodi/Jur/Fakultas	Akuntansi / P. Akuntansi / FE
Telepon	081328656250
Email	ahmadsamlawi@uny.ac.id
<b>MAHASISWA 1</b>	
Nama	Ghina Wintang Alfiana
NIM	17812144014
<b>MAHASISWA 2</b>	
Nama	Wulan Ramadhani
NIM	17812144017

## J. RENCANA KEGIATAN

No.	Kegiatan	Bulan					
		Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli
1.	Tahap Penyusunan Proposal	xxx	xxx				
2.	Tahap Pengumpulan Data			xxx	xxx		
3.	Analisis Data						xxx
4.	Penyusunan Laporan				xxx	xxx	xxx
	a. Draft Laporan					xxx	xxx
	b. Seminar/diskusi					xxx	xxx
	c. Revisi Laporan					xxx	xxx
	d. Penyerahan Laporan						xxx

## K. RENCANA BIAYA PENELITIAN

PENERIMAAN DANA PENELITIAN				Rp10.000.000	
PENGELUARAN					
Bahan Habis Pakai dan Peralatan penunjang					
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Harga Peralatan Penunjang (Rp)	
Alat Tulis Kantor	Pembuatan dan pelaporan penelitian	1 paket	50.000	100.000	
Kertas HVS	Pembuatan proposal dan laporan penelitian	2 rim	50.000	100.000	
Souvenir untuk responden	Pengambilan data penelitian	8org	150.000	1.200.000	
Tinta printer	Mencetak proposal, dokumen, materi, dan laporan penelitian	1 buah	150.000	150.000	
Flashdisk 64GB	Penyimpanan data bagi anggota peneliti	5 buah	109.000	545.000	
Pulsa telepon	Koordinasi tim peneliti	5 paket	150.000	750.000	
Pulsa Internet	Akses internet	5 paket	100.000	500.000	
SUB TOTAL (Rp)				3.345.000	

Perjalanan, akomodasi, dan konsumsi				
Material	Justifikasi Perjalanan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya (Rp)
Konsumsi Seminar Proposal dan Seminar Hasil Penelitian	Konsumsi peserta seminar proposal dan seminar hasil penelitian	2 x	525.000	1.050.000
Transportasi peneliti ke lokasi pengambilan data	Pengambilan data penelitian	8	250.000	2.000.000
SUB TOTAL (Rp)				3.050.000
Pelaporan, pustaka, publikasi				
Kegiatan	Justifikasi	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya (Rp)
Pengumpulan materi/referensi penelitian	Diskusi dan dokumentasi penelitian referensi	1	500.000	500.000
Penyusunan Proposal penelitian	Diskusi dan penyusunan laporan penelitian	1	500.000	500.000
FGD dan penyusunan instrument wawancara	FGD dengan rekan sejawat untuk mencari rumusan pertanyaan yang akan digunakan	1	750.000	750.000
Pengambilan dan interpretasi data penelitian	Menyusun matriks hasil analisis	2	750.000	1.500.000
Penyusunan laporan penelitian	Diskusi dan penyusunan laporan penelitian	1	500.000	300.000
SUB TOTAL (Rp)				3.550.000
TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN (Rp)				9.945.000